

BAB V

Pembahasan

Partai politik sebagai suprastruktur sistem demokrasi sangat penting bagi demokratisasi dan tatanan sosial masyarakat. Partai secara internal merupakan keharusan bagi pelaksanaan demokrasi dalam sistem politik. Secara prosedur dan mekanisme, partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu menerapkan demokrasi internal partai. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan peluang kepada seluruh anggota, pengurus dan kader partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, lebih jauh hal ini diterapkan dalam semua proses pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan partai Golkar ini sendiri. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, Partai Golkar selalu mengedepankan proses musyawarah dalam membuat sebuah kebijakan maupun aturan-aturan tertentu.

Meskipun demikian, AD/ART partai menegaskan dalam hal dan kondisi tertentu. Partai Golkar wajib meminta masukan masukan dari tokoh tokoh dan dewan pertimbangan partai dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian kewenangan dewan pertimbangan hanya bisa memberikan saran kepada partai. Selain itu, intervensi dari DPP kepada DPD I masih sangat kuat dalam setiap pengambil kebijakan tertentu yang dilakukan oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung. Seperti dalam penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

meskipun pada prinsipnya usulan tersebut sudah diambil kebijakan melalui mekanisme partai oleh seluruh DPD dan DPC.

Selain kepentingan-kepentingan segelintir elit politik di partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mendominasi dalam pengambilan kebijakan. Sehingga realitas yang terjadi kepengurusan yang ada tidak memiliki power yang ada. Dalam artian, masukan kader partai Golkar sendiri tidak dioptimalkan.

5.1. Rekrutmen Politik

Partai Politik berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi rakyat dan warga negara. Karena itu, partai politik pada umumnya memiliki beberapa fungsi, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, sarana partisipasi politik, sarana pembuat kebijakan, sarana pengaturan konflik, dan sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa (Haryanto, 14).

Fungsi rekrutmen politik menjadi salah satu fungsi partai bekerja untuk merekrut masyarakat agar berperan aktif dalam proses politik. Rekrutmen menjadi hal yang penting, karena posisi sentral partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politiklah yang melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat dalam mekanisme demokrasi, sehingga rekrutmen yang dilakukan partai politik akan menentukan kualitas kepemimpinan masyarakat.

Rekrutmen dalam beberapa literatur ilmu politik menempatkan posisi penting

seperti yang diungkapkan Ramlan Surbakti (1992:118), bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, telah diatur sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

5.1.1. Penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sebagai Partai Politik yang melaksanakan amanat undang undang, Partai Golkar melaksanakan proses penjaringan dengan mekanisme dan pola yang berbeda. Proses penjaringan dilakukan secara tertutup tanpa dilakukan secara terbuka seperti yang dilakukan partai-partai lain. Tiga hal penting mengapa partai Golkar melakukan proses rekrutmen secara tertutup dan eksklusif. *Pertama*, sikap otoriter ketua partai yang tidak menginginkan adanya calon lain yang masuk ke partai Golkar. *Kedua*, seluruh cabang apabila melawan dan kritis terhadap kebijakan akan di keluarkan dari kepengurusan partai Golkar, dan apabila yang sedang menjabat anggota DPRD

Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan dilakukan pergatian antar waktu (PAW). *Ketiga*, sebagian elit yang terlibat dari pengurus cabang dan provinsi sudah pragmatis, menerima uang agar menyepakati kebijakan yang dibuat ketua DPD I Hidayat Arsani yang juga calon dari partai Golkar. Oleh karena itu, proses ini tidak diketahui secara luas dan terbuka. Hasil wawancara dengan ketua DPD II Pratai Golkar Kabupaten Bangka Selatan, H. Marsidi mengatakan bahwa proses yang dimainkan oleh partai Golkar sangat tertutup, eksklusifitas ini mengakibatkan tidak adanya kesempatan anggota luar untuk mendaftar sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal senada juga diungkapkan Marizal selaku sekretaris DPD II partai Golkar Kota Pangkal Pinang. Berikut hasil wawancara dengan Marizal:

“Memang harus kita akui kalau proses penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertutup. Ini tidak kita lakukan karena seluruh pengurus cabang telah sepakat mengusung Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur dari partai Golkar. Elit partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah bermain dengan pengurus cabang untuk sepakat mengusung Hidayat Arsani. Sikap pragmatisme itu yang membuat seluruh pengurus luluh. Oleh karena itu partai Golkar tidak perlu dibuka lagi untuk umum”

Dengan demikian, proses penjaringan yang dilakukan partai Golkar Bangka Belitung dilaksanakan secara tertutup. Hal ini dikarenakan orientasi di pemilihan Gubernur sudah berbeda dari cita-cita partai. Permainan elit di DPD I dan DPD II melanggar konstitusi partai di halalkan melalui uang. Upaya melaksanakan demokrasi

internal partai tidak berjalan dengan maksimal.

5.1.2. Seleksi Dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Seperti yang telah dijelaskan diatas, proses seleksi yang dilakukan partai Golkar dilaksanakan secara tertutup. Partai Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam proses ini. Hasil wawancara dengan Ketua DPD Golkar Bangka Belitung, Hendra Apollo mengatakan bahwa, *pertama*, partai politik akan menekankan kepada aspek loyalitas calon gubernur yang akan diusung kepada partai Golkar. *Kedua*, mengenai kapasitas seseorang yang menjadi pertimbangan setiap partai Golkar. *Ketiga*, partai Golkar disetiap perhelatan pesta demokrasi lebih mengutamakan kader Golkar sendiri daripada eksternal. Berikut kutipan wawancara :

“Dalam hal proses penjangkaran calon gubernur, sejujurnya Hasil rapat terbatas dengan seluruh DPD tingkat I se-Bangka Belitung telah sepakat menetapkan pak Hidayat Arsani sebagai calon tunggal dari partai Golkar, meski rapat itu tidak melibatkan pengurus di DPD II”.

Keyakinan partai Golkar terhadap kapasitas para kadernya untuk menjaga nama baik partai dan berkelakuan jauh dari hal-hal tercela merupakan salah satu alasan eksklusifitas proses rekrutmen yang dilakukan partai Golkar.

Eksklusifitas proses rekrutmen bakal calon gubernur mengisyaratkan tiga hal, yaitu: *Pertama*, Pemilihan Umum Internal dikalangan kader inti partai Golkar, *kedua*, rekrutmen penjangkaran bukan berdasarkan kader inti tetapi masih merupakan kader partai dengan catatan telah diyakini akan prilakunya dan tidak akan membuat

permasalahan bagi nama baik partai. *Ketiga*, kader partai sendiri dianggap mampu bersaing mengingat partai Golkar adalah partai kedua perolehan suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kategori ketiga memiliki peluang kecil diterapkan karena alasan prinsip untuk memprioritaskan kader inti partai.

5.1.3. Keterbukaan Dalam Proses Rekrutmen

Selama proses rekrutmen dilakukan di internal partai Golkar, tidak ada informasi yang terpublikasikan secara terbuka dari internal partai terkait dengan sejauh mana proses rekrutmen bakal calon Gubernur berjalan. Singkatnya tidak ada informasi untuk masyarakat secara luas dalam mendapatkan informasi proses rekrutmen calon. Karena semua kegiatan rekrutmen bersifat tertutup dan eksklusif. Hasil wawancara dengan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangka Selatan, H. Marsidi Satar mengatakan bahwa :

“Memang begitu adanya, proses rekrutmen calon gubernur memang tertutup, bahkan proses itu tidak dibuka secara umum seperti yang kita lakukan setiap rekrutmen. Semua keputusan ada di DPD tingkat I, kami hanya di intruksikan untuk membentuk tim pemenangan saja. Tetapi tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen”.

Hal senada juga disampaikan Heriyawandi selaku sekretaris DPD Golkar Provinsi Bangka Belitung, berikut kutipannya :

“Memang semua pengurus DPD se-Bangka Belitung waktu itu telah sepakat untuk mengusung pak Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur. Meski ada beberapa orang yang mencoba masuk ke partai Golkar tapi semua di tolak karena

pak Hidayat waktu itu juga menjabat sebagai ketua umum. Harus kita akui, beberapa proses dalam seleksi tidak dijalankan mengingat sudah ada mandat dari seluruh DPD Kabupaten/Kota untuk pak Hidayat”.

Pada saat proses rekrutmen dilaksanakan, enam DPD II Kabupaten/Kota telah menyepakati mengukung Hidayat Arsani. Namun demikian, ada satu DPD II yaitu DPC Bangka Barat yang tidak sepakat. Alhasil, ketua DPD Bangka Barat di pecat dari kepengurusan Partai Golkar. Jadi enam DPD II hanya melangkapi persyaratan untuk kemudian diserahkan ke DPP Partai Golkar. Meskipun pada realitas yang terjadi sebenarnya ada beberapa mekanisme yang tidak dijalankan oleh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.1.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Rekrutmen

Dalam proses rekrutmen calon Gubernur di partai Golkar, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut tidak ada. Mekanisme yang berjalan tidak secara maksimal melibatkan masyarakat umum. Karena partai Golkar melaksanakan rekrutmen secara tertutup. Eksklusifitas Partai Golkar dalam proses rekrutmen diindikasikan karena Hidayat Arsani tidak menginginkan ada calon lain di partai Golkar. Hasil wawancara dengan Ketua DPD Golkar, Hendra Apollo mengatakan bahwa adanya politik dagang sapi di internal partai Golkar Bangka Belitung. Pragmatisme politik sangat kuat, sehingga informasi informasi yang ada di internal Golkar tidak diketahui masyarakat. Hanya

segelintir orang saja yaitu elit partai Golkar. Partai Golkar menempatkan masyarakat sebagai konstituen dalam momentum politik. Selain itu, partai Golkar akan lebih inklusif dan fleksibel berhubungan dengan masyarakat dalam proses pemenangan dalam pilkada.

5.2. Institusionalisasi Partai Politik

Institusionalisasi Partai Politik menurut Basedau dan Stroh (2008), adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Institusionalisasi partai politik di dalam internal partai Golkar dibagi dalam empat variabel, seperti yang dijelaskan pada sub bab pembahasan berikut ini :

5.2.1 *Roots in society* (Mengakar Dalam Masyarakat).

Pada dasarnya konsep *roots in society* adalah sebuah pemahaman publik terhadap partai itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan politik dan sosialisasi diperlukan dalam upaya mewujudkan citra partai yang baik. Partai politik harus mampu mensosialisasikan ideologi dan cita-cita partai kepada masyarakat luas. Dukungan masyarakat tidak diperlukan hanya dalam pemilu, namun demikian lebih spesifik kepada masa depan partai dan pelebagaan partai. Selain itu, partai politik harus bisa mencitrakan diri kepada publik yang berorientasi

kepada kepercayaan yang tinggi dari publik terhadap partai. Secara bermaan, akan berdampak terhadap internal partai, misalnya dalam hal dukungan konstituen dalam pagelaran pesta demokrasi periodik. Faktanya, banyak partai yang terus berupaya untuk tampil sebagai partai yang pro rakyat.

5.2.1.1. Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kancan politik lokal menjadi salah satu partai yang tidak bisa dianggap remeh oleh partai lain. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ditingkat lokal baik pemilihan legislatif maupun pemilukada dan Pilkada. Partai Golkar adalah salah satu partai yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari perolehan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengantarkan kadernya sebanyak 7 (tujuh) orang di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pileg tahun 2014. Bahkan salah satunya meraih perolehan suara tertinggi dan menjabat wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pada level eksekutif partai Golkar berhasil mengantarkan Riza Herdavid (wakil ketua bidang perekonomian) sebagai wakil bupati Bangka Selatan periode 2015-2020. Selain itu sejak partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk telah berhasil mengantarkan Hudarni Rani (ketua Golkar pertama) sebagai Gubernur Bangka Belitung, kemudian dilanjutkan Eko Maulana Ali (mantan ketua kedua) sebagai Gubernur Bangka Belitung dua periode. Selain itu, Hidayat Arsani (mantan

ketua ketiga) sebagai wakil Gubernur berpasangan dengan Rustam Effendi sebagai Gubernur. Dengan demikian, partai Golkar Bangka Belitung memiliki cukup kekuatan di kancah politik lokal dan memiliki citra yang bagus.

Hasil wawancara dengan ketua Golkar Bangka Belitung, Hendra Apollo yang juga menjabat wakil ketua DPRD mengatakan bahwa partai Golkar memiliki strategi sendiri dalam meraih citra positif di masyarakat. Partai Golkar melalui fraksi fraksi di DPRD selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung. Selain itu, anggota DPRD dari partai Golkar selalu merespon cepat isu isu aktual di masyarakat dan selalu mengambil langkah solutif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan dilevel eksekutif kader Golkar selalu merumuskan kebijakan kebijakan yang pro rakyat.

“Saya selaku ketua Golkar memang selalu menekankan kepada seluruh kader yang menduduki jabatan dilevel eksekutif maupun legislatif haruslah membangun komunikasi dengan masyarakat lebih intens, sehingga kita selalu tahu kondisi masyarakat dilapangan, selain itu dalam hal perumusan kebijakan haruslah teknokratik sehingga kebijakan kebijakan yang dirumuskan memang betul betul untuk rakyat”.

Strategi yang dibangun partai Golkar terbukti ampuh mendongkrak populitas partai Golkar di tingkat lokal.

5.2.1.2. Kiprah Partai di Masyarakat

Kiprah partai Golkar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam konteks pemilu, partai Golkar sangat familiar, hal ini ditegaskan melalui perolehan suara yang mengantarkan beberapa elit partai menduduki jabatan

anggota DPRD. Kiprah Partai Golkar dimasyarakat diwujudkan melalui kegiatan kegiatan partai, baik itu dilakukan secara kelembagaan dan individu elit dan anggota partai. Selain itu melalui Reses, anggota DPRD dari partai Golkar selalu menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pendekatan persuasif diluar jadwal reses. Melalui diskusi lokal dan pasar murah di momentum momentum juga merupakan strategi partai Golkar meningkatkan eksistensi di masyarakat.

Anggota dan Elit partai Golkar bisa memanfaatkan kegiatan kegiatan dan momentum dalam meningkatkan eksistensi dan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam kegiatan kegiatan keagamaan, elit dan anggota partai selalu hadir ditengah tengah masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pencitraan berorientasi kepada eksistensi partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2.1.3. Kestabilan Dukungan Pemilu

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perolehan suara partai Golkar di beberapa pemilu mengalami pasang surut. Pada tahun 2009 sejak H. Eko Maulana Ali menjabat sebagai ketua DPD I, partai Golkar mendapat perolehan suara kedua terbanyak di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan 7 kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel perolehan suara partai Golkar di Bangka Belitung :

Tabel 5.1

Perolehan Suara dan Kursi Partai Golongan Karya Pemilu 2009 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Perolehan Suara Golkar	Urutan Parpol	Jumlah Kursi DPRD
1	Kota Pangkal Pinang	8.160 Suara	Kedua	1 Kursi
2	Kab. Bangka	11.671 Suara	Keempat	1 Kursi
3	Kab. Bangka Selatan	13.941 suara	Pertama	1 Kursi
4	Kab. Bangka Barat	5.774 Suara	Kelima	1 Kursi
5	Kab. Bangka Tengah	11.240 Suara	Kedua	1 Kursi
6	Kab. Belitung/Belitim	21.209 Suara	Pertama	2 Kursi

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009).

Perolehan suara tersebut menandakan partai Golkar bisa merebut simpati konstituen. Berbeda dengan partai yang berideologi islam seperti Partai Persatuan Pembangunan. Partai PPP hanya bisa meraih 6 kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel perolehan suara di Pileg 2009 :

Tabel 5.2

Perolehan Suara dan Kursi Partai Persatuan Pembangunan Pileg 2009 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Perolehan Suara PPP	Urutan Parpol	Jumlah Kursi DPRD
1	Kota Pangkal Pinang	4.707 Suara	Kelima	1 Kursi
2	Kab. Bangka	13.861 Suara	Ketiga	2 Kursi
3	Kab. Bangka Selatan	4.284 suara	Keenam	----
4	Kab. Bangka Barat	4.077 Suara	Keenam	1 Kursi

5	Kab. Bangka Tengah	5.306 Suara	Ketiga	1 Kursi
6	Kab. Belitung/Belitim	5.777 Suara	Kelima	1 Kursi

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perolehan suara diatas menandakan perolehan suara di Pileg 2009 partai Golkar masih sangat tinggi dibandingkan dengan partai PPP dan partai lain peserta pemilu 2009. Signifikannya perolehan suara mengindikasikan Golkar melekat di hati konstituen. Sedangkan pada Pada tahun 2012, terdapat empat pasang kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Eko Maulana Ali dan Rustam Effendi yang diusung Golkar, PDIP, dan PKS. Yusron-Yusroni maju menggunakan kendaraan PBB & PPP, sementara Zulkarnain-Darmansyah mendapatkan mandat dari Partai Demokrat dan PAN. Dan selanjutnya Hudarni-Justiar maju dengan diusung HANURA, Gerindra, PPRN, PK, PDP, PBR, PKPB PIS.

Tabel 5.3

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012

No	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Zulkarnain Karim dan Ir. H. Darmansyah Husien.	Partai Demokrat dan PAN	129.193 (25,2%)
2.	Drs. H. A. Hudarni Rani, SH dan Drs. H. Justiar Noer, M.Si.	HANURA, Gerindra, PPRN, PK, PDP, PBR, PKPB PIS	61.185 (11,9%)
3.	Ir. H. Eko Maulana Ali dan H. Rustam Effendi, B.Sc.	Partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, dan	

		Partai Keadilan Sejahtera.	169.790 (33,2%)
4.	Dr. Yusron Ihza, LL.M dan H. Yusroni Yazid, SE	PBB & PPP	150.643 (29,45%)

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Satu tahun menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013, Eko Maulana Ali yang kembali terpilih dan menjabat di periode kedua meninggal dunia. Kenyataan itu mengisyaratkan partai Golkar kembali memilih ketua baru. Alhasil pada tahun 2013 terpilih Hidayat Arsani yang juga menjabat sebagai ketua harian partai sebagai ketua umum partai Golkar yang baru. Pada pemilu tahun 2014 yang saat itu dinahkodai oleh Hidayat Arsani partai Golkar kembali mendapatkan perolehan suara yang saam denga pemilu 2009 yaitu memperoleh suara terbanyak kedua di pemilihan legislatif dengan perolehan 7 kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut hasil perolehan suara partai Golkar :

Tabel 5.4

Perolehan Suara / Kursi Parpol Pemilu 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	21.661 Suara	3 Kursi
2	Parti Gerakan Indonesia Raya	21.707 Suara	2 Kursi

3	Partai Keadilan Sejahtera	42.320 Suara	5 Kursi
4	Partai Amanat Nasional	26.579 Suara	3 Kursi
5	Partai Golongan Karya	71.995 Suara	7 Kursi
6	Partai Persatuan Pembangunan	37.967 Suara	7 Kursi
7	Partai Bulan Bintang	33.060 Suara	3 Kursi
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	88.141 Suara	8 Kursi
9	Partai Demokrat	47.381 Suara	7 Kursi
Jumlah		464.240 Suara	45 Kursi

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perolehan suara diatas menegaskan pergantian ketua partai dan calon di legislatif, eksekutif tidak serta mengubah perolehan suara dan simpati konstituen untuk selalu memilih wakil rakyat yang diusung oleh partai Golkar. Kestabilan dukungan politik secara perolehan suara mengalami pasang surut. Meski demikian tidak lantas berindikasi kepada kehancuran masa depan partai di Bangka Belitung.

5.2.2. Autonomy

5.2.2.1. Otonomi Dalam Pengambilan Keputusan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya. Dalam hal pengambilan keputusan, partai Golkar selalu berpedoman kepada mekanisme partai yang telah di rumuskan bersama. *Pertama*, dalam pengambilan keputusan, partai Golkar selalu berdasarkan aturan Ad/Art partai. Baik dalam pengambilan kebijakan kebijakan partai dalam perhelatan konstestasi politik

ditingkat lokal seperti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). *Kedua*, selain kebijakan aturan Ad/Art, partai selalu berpedoman kepada aturan aturan yang dibuat pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. DPD I partai memiliki otoritas dalam menyeleksi seluruh tahapan pilkada untuk seterusnya diberikan ke tingkat yang lebih tinggi kedudukannya.

Namun demikian, kemandirian dalam pengambilan keputusan masih diwarnai dengan kepentingan kepentingan segelintir elit partai. Biasanya intervensi yang dilakukan elit elit partai bisa saja tidak sejalan dengan keinginan dan kehendaki partai itu sendiri. Kepentingan elit ini kemudian bisa saja bermain untuk mengkhendaki kepentingan kepentingan di inginkan partai. Melalui jaringan jaringan tertentu elit partai bermain ketinggian partai yang lebih tinggi seperti yang dikemukakan Hendra Apollo ketua partai Golkar.

“Harus kita akui, sulit membantah adanya permainan segelintir elit partai yang mengintervensi kebijakan partai dengan bermain di tingkat DPP, Pilkada 2017 sangat kompleks dengan kepentingan kepentingan elit sehingga kita tidak di perhatikan. Elit partai atau senior kita selalu potong kompas untuk kepentingan mereka”

Intervensi dan campur tangan kepentingan elit dalam pengambilan keputusan menjadi partai tidak independen dalam pengambilan keputusan. Ketelibatan elit ini dikarena mereka sebagai donator dalam kemajuan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, otonomi dalam pengambilan partai tidak sepenuhnya dimiliki partai Golkar. Otonomi partai

Golkar tidak lepas dari intervensi internal partai. Persoalan kepentingan dan dominasi elit tidak bisa dihapuskan dalam proses pengambilan keputusan partai.

5.2.2.2. Peran “Politik Dagang Sapi” Dalam Partai

Seperti yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya. Rekrutmen kandidat di Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di internal partai Golkar diwarnai dengan kekuasaan dan uang. “Politik Dagang Sapi” adalah istilah yang disebutkan oleh ketua DPD I. Sikap otoriter yang digunakan Hidayat Arsani sewaktu memimpin partai memberikan dinamika tersendiri di internal partai. Proses dialogis dan mekanisme partai seringkali tidak dipatuhi oleh Hidayat Arsani.

Menjelang Pilgub 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suhu politik di internal partai Golkar tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi di partai politik lain yang ada di Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan Hidayat Arsani tidak melakukan rekrutmen secara terbuka untuk umum yang bersedia mencalonkan diri di partai Golkar. Berikut hasil wawancara dengan Hendra Apollo ketua DPD I partai Golkar Bangka Belitung :

“Dalam proses rekrutmen kandidat di pilgub, partai Golkar tidak melakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme AD/ART, hal ini karena Hidayat Arsani sewaktu menjabat sebagai ketua sangat otoriter, apabila ada yang membantah akan di pecat dari partai, selain itu

adanya politik dagang sapi, perputaran uang saat itu sangat cepat ke DPP sehingga rekomendasi jatuh ke Hidayat Arsani”.

Hal senada disampaikan H. Marsidi selaku ketua DPD II Kabupaten Bangka Selatan, berikut hasil wawancaranya :

“Ada banyak mekanisme AD/ART partai yang dilanggar oleh Hidayat Arsani, kami di DPC di intervensi untuk memilih Pak Hidayat, padahal survey internal partai hanya 12% kalah dengan calon yang lain. Sangat disayangkan kami diancam di PAW dari partai apabila tidak patuh.”

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh klientisme dalam partai masih sangat tinggi. Dimana kader partai seperti Hidayat Arsani tidak didasarkan atas ideologi dan konstitusi partai. Selain itu, otoriterisme kepemimpinan menyebabkan anggota secara luas tidak dilibatkan, sikap pragmatisme ini kemudian menempatkan pengurus partai yang lain hanya sebagai pelengkap struktural.

5.3.1. Level Of Organization

Bab ini secara spesifik akan menjelaskan tentang dinamika internal organisasi. Dalam upaya menjelaskan proses tersebut, penulis menggunakan 2 indikator, yaitu kekuatan organisasi, dan model dan sumber keuangan partai Golkar guna menjaga eksistensi dan keutuhan partai.

5.3.1.1. Kekuatan Organisasi

Kekuatan organisasi dapat dilihat melalui keutuhan internal organisasi partai Golkar dari level DPP sampai DPD II. Menurut hasil wawancara dengan ketua partai Golkar Bangka Belitung, sejauh partai Golkar dibentuk tidak ada gejolak di internal partai. Meskipun ada sedikit kritik dari anggota maupun simpatisan. Hal itu merupakan upaya kader untuk menata kembali partai Golkar sesuai dengan prinsip partai. Selain itu, upaya meredam gejolak yang ada, partai selalu memberdayakan seluruh anggota, melibatkan seluruh anggota disetiap perumusan kebijakan yang ada di DPD I Golkar Bangka Belitung. Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPD II Kabupaten Bangka Selatan faksi-faksi yang muncul itu hanya momentum misalnya di pengambilan kebijakan terhadap arah partai kedepan, dan kekecewaan terhadap kebijakan partai. Hal ini senantiasa ditanggapi sebagai bagian dari dinamika politik di internal partai. Secara keseluruhan, faksi-faksi yang muncul tidak mengganggu keutuhan organisasi dan harmonisai seluruh kader Golkar.

5.3.1.2. Sumber Keuangan Partai

Sejak terbentuknya partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung delapan belas tahun yang lalu. Dalam upaya menghidupkan roda partai, uang operasional didapatkan melalui sumbangan-sumbangan dari eksternal partai maupun internal partai. Selain itu, sumber keuangan partai didapatkan melalui iuran partai.

Tabel 5.5

Sumber Keuangan Partai

No	Sumber	Jumlah
1.	Iuran Partai	50.000/Bulan
2.	Fraksi Golkar	1.800/suara
3.	Sumbangan Simpatisan	100jt-200jt

Sumber : Diolah oleh penulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPD I partai Golkar Bangka Belitung. Hendra Apollo mengatakan sebagai berikut :

“Uang operasioanal partai kami dapatkan dari dua sumber, uang iuran partai berupa , selain itu kita dapatkan iuran dari fraksi Golkar berupa dua juta rupiah perorang perbulan. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD atau bantuan pemerintah 1800/suara , dan yang lain kita dapatkan dari sumbangan simpatisan partai dan pengusaha berupa 100jt sampai 200jt”.

Meski demikian, tidak semua kader partai Golkar yang menaati seluruh kewajiban iuran yang sudah ditetapkan oleh partai. Kenyataan ini kemudian memunculkan ketidakpedulian kader terhadap masa dengan masa depan partai. Hal ini menyebabkan leluasanya oknum eksternal yang membantu biaya operasional partai mengintervensi di setiap kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh partai.

5.3.1.3 Rekrutmen Keangotaan dan Kaderisasi di Partai Golkar

Dalam proses rekrutmen kader dan kaderisasi di partai Golkar sudah diatur di dalam AD/ART partai. Dalam proses tersebut, rekrutmen anggota

partai tidak dilakukan secara terbuka. Partai Golkar lebih mengutamakan kader yang sudah berproses di badan otonom (banom) partai untuk menjadi pengurus partai baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini ditempuh agar secara ideologi seluruh anggota yang akan bergabung sudah sangat memahami.

Selain itu, secara tegas partai Golkar menolak proses nepotisme dalam proses rekrutmen. Hasil wawancara dengan ketua DPD partai Golkar mengatakan sebagai berikut :

“Partai Golkar menolak seluruh bentuk KKN baik dalam proses apapun di dalam partai. Kita mengutamakan AD/ART partai bukan uang. Sesuai dengan moto partai yaitu “golkar bersih, golkar bangkit”. Oleh sebab itu, uang bukan segala di partai kami”

Jika melihat penjelasan ketua DPD I partai Golkar, maka dapat dilihat bahwa komitmen partai Golkar kepada konstitusi dan ideologi partai sangat kuat. Selain itu, hal ini diberlakukan sebagai bentuk mengurangi kecemburuan sosial sesama kader partai. Dengan demikian, militansi terhadap partai dapat terwujud dan berdampak positif terhadap partai Golkar sendiri.

Sementara itu dalam proses kaderisasi kader dan anggota partai Golkar. Proses kaderisasi dilakukan sebagai upaya menciptakan generasi-generasi anak muda beringin yang peduli dan simpati terhadap partai keberlangsungan partai Golkar dan kemajuan masa depan partai Golkar. Subsansi kaderisasi adalah membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga calon Gubernur yang akan diusung berperan baik di eksekutif. Jika kader berkualitas,

sejatinya pejabat publik terpilih yang telah lolos proses perekrutan akan baik pula. Oleh sebab itu, hal mustahil peran partai politik mewujudkan Negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat tidak terwujud. Dengan demikian, orientasi ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga rekrutmen sumber daya manusia benar sejalan dengan kehendak kolektivitas dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Kaderisasi Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perintah amanat konstitusi partai, selain kaderisasi juga dilakukan diklat khusus kader (Diklatsusder). Menurut hasil wawancara dengan Hendra Apollo ketua DPD I mengatakan, proses kaderisasi dilakukan sejak kader berproses di badan otonom seperti AMPG, AMPI, Kosgoro. Program kaderisasi partai Golkar adalah pelatihan Karakterdes. Output dari program ini mewujudkan kader yang memahami ideologi, program-program yang akan dilaksanakan, serta diberikan bekal untuk siap menjadi kader partai yang progresif, inovatif dan visioner.

Sedangkan proses kaderisasi untuk pengurus DPD I dan DPD II dan pejabat partai secara intens dilakukan melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan pengembangan kompetensi bagi seluruh pengurus dan pejabat partai. Ini dilakukan sebagai upaya melaksanakan amanah partai yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan partai yang berlaku.

5.4.1. Coherence

5.4.1.1. Soliditas Pemenangan Partai di Pilgub

Soliditas pemenangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diusung oleh partai Golkar berubah menjadi konflik caci maki. Konflik yang meletup dalam proses rekrutmen calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini diasumsikan reputasinya dukungan secara totalitas dari internal partai. Dukungan dari jaringan partai yang kuat akan lebih memungkinkan calon menjangkau banyak pemilih. Pasangan calon dan partai yang mengusungnya dapat membuat tim kampanye yang solid dan menyewa konsultan pilkada yang memahami taktik dan strategi pemenangan. Pendeknya, semakin prima mesin politik semakin mudah bagi pasangan calon dalam meraih kursi kepala daerah. Namun demikian yang terjadi adalah ketidakharmonisan yang menyebabkan pembelotan kader Golkar mendukung calon lain yang bertarung dalam kontestasi politik.

Hasil wawancara dengan Heriyawandi selaku sekretaris partai Golkar periode 2012-2017 mengatakan adanya pembelotan kader yang tidak mendukung calon dari partai Golkar. Sikap kekanak-kanakan ketua DPD I menyebabkan kader menjadi antipati. Dalam proses demokrasi, sudah menjadi hal yang lumrah ketika aktor-aktor lokal dan berbagai elit-elit partai secara spontanitas menyatakan sikap untuk mendukung salah satu kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi eksekutif Gubernur. Tidak bisa dibantahkan hal semacam itu terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia.

Di internal partai Golkar Bangka Belitung, hal demikian juga terjadi. Misalnya secara terbuka para elit partai dan kader mendukung salah satu kandidat lain. Bagi elit partai, Pilkada tak lebih hanya sebatas momentum untuk menyalurkan hak dan kewajiban politik. Tetapi, berbicara masa depan partai.

Hasil wawancara dengan Hendra Apollo, berikut kutipan wawancara :

“Ada banyak kader yang membelot mendukung pasangan lain. Kita harus hormati semua keputusan mereka. Alasannya karena tidak sepakat Hidayat Arsani maju. Sehingga mereka memutuskan mendukung yang lain dan keluar dari partai seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka induk dan Bangka Barat”.

Pembelotan kader mendukung calon lain merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh partai Golkar. Selain itu merupakan sikap kritis yang penuh dengan konsekuensi yang merugikan calon dari partai Golkar.

5.4.1.2. Kekompakan Internal Partai

Proses demokratisasi di dalam internal partai Golkar mengalami kemunduran, hal ini disebabkan oleh otoritarisme ketua partai dalam proses penentuan kandidat di Pilgub 2017. Kebijakan yang tidak mengakomodir seluruh masukan dari pengurus setingkat dibawah DPP. Dalam artian, proses pembuatan keputusan didalam internal partai hampir semua partai politik dapat disimpulkan tidak mewakili seluruh anggota partai, keputusan hanya bersifat kolektif karena dalam praktek pembuatan keputusan berada pada satu tangan penguasa dan elit partai (personalistik) dan/ atau sekelompok kecil elit partai yang sangat loyal kepada sang penguasa (oligarhik).

Kenyataan itu menghasilkan konflik di dalam internal partai, sebagian dari pengurus memutuskan untuk keluar dari partai. Menurut hasil wawancara dengan ketua DPD I partai Golkar mengatakan :

“Ada banyak kader yang sesungguhnya tidak sepakat dengan majunya Hidayat Arsani sebagai Gubernur. Namun pengurus DPC tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pengurus DPD I. harus kita aku sehingga banyak kader yang tidak sejalan di dikeluarkan dari partai dan mengundurkan diri”

Sikap kritis pengurus dan kader dalam menyikapi kebijakan dan persoalan masalah dinamika di internal menimbulkan sikap antipati terhadap proses pemenangan partai di Pilgub 2017. Ketidakharmonisan ini disampaikan oleh H. Marsidi selaku ketua DPD II Kabupaten Bangka Selatan. Berikut hasil wawancara:

“Bagaimana mau harmonis, kami tidak pernah dilibatkan dalam proses apapun, bahkan ketua DPD II Bangka Barat di pecat oleh ketua lama karena tidak sejalan dengan beliau, kamu ikut saja kebijakan apapun daripada posisi kami terancam”.

Pemecatan secara faksa yang dilakukan Hidayat Arsani menyisakan konflik yang mendalam di internal partai, sehingga kader partai menjadi tidak kompak antara kader dan pengurus harian dan situasi di internal menjadi tidak harmonis dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.